

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS. INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke

12

Tahun Sidang

2025-2026

Masa Persidangan :

Jenis Rapat/ke-

Rapat Kerja / ke-5

Dengan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Sifat Rapat

Terbuka

Hari, Tanggal

: Rabu, 3 September 2025

Waktu

: Pukul 11.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I

Ketua Rapat

: Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

(Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat

: Danis Mava

Acara

(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI) : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

PPN/Bappenas pada APBN TA 2026.

Hadir

: 1. ... orang dari 48 Anggota Komisi XI DPR RI; dan

2. RACHMAT PAMBUDY (Menteri PPN/Kepala Bappenas)

Kementerian

beserta jajarannya.

#### I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 dan Pasal 281 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 11.57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

### II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyepakati halhal sebagai berikut:

- Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2026 (APBN TA 2026).
- Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN Tahun 2026 sebesar Rp2.597.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:

| NO    | NAMA PROGRAM                     | PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah) |
|-------|----------------------------------|---|
| 1     | Perencanaan Pembangunan Nasional | 1.069.286.597.000                       |
| 2     | Dukungan Manajemen               | 1.527.713.403.000                       |
| Total |                                  | 2.597.000.000.000                       |

Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2026, sebagai berikut:

| FUNGSI                                   | PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah) |
|--|---|
| 055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS             | 2.597.000.000.000                       |
| 01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM               |   |
| Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 1.069.286.597.000                       |
| Program Dukungan Manajemen               | 1.527.713.403.000                       |

- 3. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat upaya, kebijakan, dan program untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial, mendukung pencapaian penurunan kemiskinan termasuk graduasi kemiskinan, SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi.
- 4. Kementerian PPN/Bappenas mensinergikan alokasi program-program Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan di seluruh daerah secara inklusif.
- 5. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian atas perencanaan program kerja Pemerintah yang diarahkan untuk capaian prioritas nasional yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
- 6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan program Kementerian/Lembaga yang menggunakan Pinjaman Luar Negeri kepada Komisi XI DPR RI untuk dibahas dan akan segera diagendakan.

7. Menteri PPN/Bappenas akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas ditutup pada pukul **13.56 WIB**.

Jakarta, 3 September 2025

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI KETUA RAPAT,

Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS,

**RACHMAT PAMBUDY**